



SALAM

Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 9 No. 6 (2022), pp. pp.1959-1968

DOI: 10.15408/sjsbs.v9i6.26819

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>



Motivasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Kepala Desa di Provinsi Jawa Timur*

Andri Rusta,¹ Hairunnas²

Universitas Andalas, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat



[10.15408/sjsbs.v9i6.26819](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i6.26819)

Abstract

One of the interesting phenomena in the decentralization and regional autonomy process was the emergence of women's candidates in direct elections of village heads. The village heads are leading public offices in Indonesia local government. Public office, as well as the political office, directly dealing with the public and providing public services to the community. The appearance of women in the political sphere is a new symptom. A women's political role which women tend to put on the condition and position of powerlessness. Women are seen as complementary sufferers in the world of politics, with direct elections the chance to be village heads to be quite strategic and not easy to be achieved for women. However, in the province of East Java, that proved highly viscous Islamic teachings, quite enough women who occupied it. In the last decade, in several villages in East Java province, some women candidates won the election. The political motivation of the women who served as street-level leader is worth a look from the perspective of gender and culture. This article provides a description of the candidate's motivation of women in local elections at village level. As such, research will be able to explain the political motivations of women more comprehensively.

Keywords: Women and Politics; Political Motivation; The Women Village Head

Abstrak

Salah satu fenomena yang menarik dalam proses desentralisasi dan otonomi daerah adalah munculnya kandidat perempuan dalam pemilihan langsung kepala desa. Kepala desa merupakan jabatan publik terdepan dalam local government di Indonesia. Jabatan publik sekaligus jabatan politik yang secara langsung berhadapan dengan publik dan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Tampilnya perempuan dalam ranah politik ini adalah gejala baru. Peran politik perempuan yang selama ini cenderung menempatkan perempuan pada kondisi dan posisi ketidakberdayaan. Perempuan hanya dipandang sebagai pelengkap penderita dalam dunia politik. Dengan pemilihan langsung, peluang untuk menjadi kepala desa menjadi cukup strategis dan tidak gampang untuk diraih bagi perempuan. Akan tetapi, di Provinsi Jawa Timur yang sangat kental ajaran Islamnya ternyata cukup banyak perempuan yang mendudukinya. Dalam sepuluh tahun terakhir, di beberapa desa di Propinsi Jawa Timur beberapa kandidat perempuan berhasil memenangkan pemilihan kepala desa. Motivasi politik perempuan-perempuan yang menjabat sebagai street level leader ini menarik untuk dilihat dari perspektif gender dan kultural. Artikel ini memberikan penjelasan mengenai motivasi kandidat perempuan dalam pemilu lokal di tingkat desa. Dengan demikian penelitian akan mampu menjelaskan secara lebih komprehensif tentang motivasi politik perempuan.

Kata Kunci: Perempuan dan Politik; Motivasi Politik; Kepala Desa Perempuan

*Received: Mei 12, 2022, Revision: June 25, 2022, Published: November 23, 2022.

¹ **Andri Rusta** adalah dosen FISIP, Universitas Andalas Padang. *Email korespondensi* arusta@soc.unand.ac.id

² **Hairunnas** adalah dosen FISIPOL Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. *Email korespondensi* khairunnask69@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Sejak 1999, Indonesia telah mengalami proses desentralisasi sebagai bagian dari transisi menuju demokrasi. Oleh karena itu, pemerintah telah menerapkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004. Kondisi ini memberikan kekuasaan dan otonomi yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam menentukan dan melaksanakan proses pembangunan di daerah mereka. Undang-undang yang didasarkan pada prinsip demokrasi dan kesetaraan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat sipil dan partisipasi masyarakat dengan memperkuat posisi perwakilan rakyat dalam meminta pertanggungjawaban eksekutif.³

Semangat reformasi demokratisasi dan otonomi daerah selalu menjadi prioritas dalam setiap tingkatan konstelasi politik dari tingkat presiden hingga pada tingkatan terendah yakni pemilihan desa. Otonomi asli desa atau penamaan lain yang dikenal dan bersumber dalam masyarakat hendak dihidupkan kembali dengan tidak menghalangi kemajuan dan dianggap tidak bertentangan dengan nilai-nilai universal, seperti nilai hak hak asasi manusia.

Berdasarkan konsep tersebut maka dapat dijelaskan bawah desa tidak hanya sekedar diperlakukan sebagai suatu wilayah administratif negara di tingkatan terendah, akan tetapi juga merupakan satu kesatuan masyarakat hukum dengan nilai-nilai serta hak-hak tradisionalnya. Status ganda ini kemudian direfleksikan secara jelas dalam pengaturan tentang wewenang dan kewajiban bagi kepala desa sebagaimana yang sudah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005. Dalam sistem pemerintahan desa, kepala desa yang memiliki wewenang pemimpin dalam proses penyelenggaraan pemerintah desa, kepala desa juga memiliki kewajiban mendamaikan perselisihan serta dapat mengayomi dan melestarikan nilai-nilai norma serta budaya adat istiadat lokal yang berlaku.⁴

Secara aturan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 secara eksplisit menyebutkan bahwa kepala desa memiliki kewenangan untuk mendamaikan suatu perkara atau permasalahan dari warga desa sebagai hak asal usul. Hal ini melekat dalam status ganda di setiap kepala desa di Indonesia. Peran ganda ini dilihat pada aspek menjalankan peran mediasi hubungan antara negara dan masyarakat. Suatu peran yang sesungguhnya tidak ringan dan tidak selalu mudah dijalankan. Kalau digunakan bahasa Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008, kepala desa disebut sebagai "orang pertama mengemban tugas dan kewajiban yang berat, karena ia adalah penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan urusan pemerintahan umum, termasuk ketentraman dan ketertiban."

Adapun fenomena menarik dari proses desentralisasi dan otonomi daerah tersebut adalah keterlibatan perempuan dalam proses pemilihan kepala desa. Peran perempuan di arena politik selama ini cenderung terabaikan dan termarginal. Arena politik selalu diasosiasikan sebagai arena patriarki. Arena yang kemudian sangat

³ Undang - Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 Tentang Desa

membatasi perempuan untuk dapat bekerja dan berkarya. Posisi perempuan yang memiliki kekuasaan pada lini domestik disisi lain perempuan di Jawa tidak terlalu muncul di ruang politik publik, walaupun selalu aktif berpolitik selaku pemilih di dalam pemilu maupun ikut dalam kampanye. Meskipun sejarah keterlibatan perempuan Indonesia dalam politik sudah terjadi sejak ratusan tahun silam, angka partisipasi perempuan di ranah publik ternyata masih terbilang rendah.

Berdasarkan catatan demokrasi di Indonesia, Pengarusutamaan peran perempuan di ruang politik sudah direktori melalui keputusan dan kebijakan-kebijakan *affirmative action*, perwujudan kebijakan ini ingin memberikan ruang perempuan dalam politik dijamin oleh negara secara penuh sehingga capaian keterwakilan perempuan dalam mengisi ruang publik strategis dapat dipenuhi. Peran perempuan di ruang publik khususnya dalam dunia politik masih meninggalkan berbagai rintangan dan catatan, pada praktiknya masih banyak dijumpai persoalan budaya patriarki yang mendominasi dalam stigma masyarakat terhadap keterlibatan perempuan dalam politik, kurangnya modal dan jaringan, persoalan internal partai, serta kuatnya persaingan dengan calon laki-laki.

Perempuan hanya mendapatkan 18,6 persen kursi di DPR pada Pemilu 2009 yang lalu, sedangkan yang menduduki jabatan gubernur hanya satu dari 34 provinsi di Indonesia. Dari total 440 jabatan bupati/walikota hanya 2,27 persen yang dipegang oleh perempuan, sedangkan untuk posisi kepala desa hanya ada 3,91 persen kepala desa perempuan.⁵ Di birokrasi pemerintahan, jenjang karir PNS perempuan juga terhenti di eselon 2 karena hanya ada 8,7 persen yang dipegang oleh perempuan, padahal di eselon 2 terdapat 45 persen perempuan.⁶

Provinsi Jawa Timur yang merupakan provinsi di ujung timur pulau Jawa merupakan provinsi dengan jumlah penduduk yang sangat majemuk dan memiliki kultur yang cukup kuat nuansa islaminya. Jawa Timur dalam sejarahnya merupakan pusat penyebaran agama islam di pulau Jawa. Lima (Sunan Ampel, Gresik, Giri, Drajat, Bonang) dari sembilan wali songo berasal dari provinsi yang kental dengan islam salafiyah-nya ini. Fenomena menarik muncul di Provinsi Jawa Timur dengan banyaknya perempuan-perempuan muncul di ranah publik. Setidak-tidaknya dalam kurun 10 tahun terakhir terdapat 3 bupati dan 1 walikota perempuan di Jawa Timur. Selain itu, dari 8.505 kepala desa terdapat sekitar 770 orang kepala desa perempuan di provinsi ini dan 1,47 persen lurah. Fenomena ini cukup menarik untuk dilihat, apakah yang menjadi motivasi perempuan-perempuan tersebut untuk bersaing dan duduk sebagai kepala desa. Berdasarkan latar belakang dan masalah yang dijelaskan di atas maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana motivasi politik perempuan menjadi kepala desa di Provinsi Jawa Timur?

Tinjauan Pustaka

Secara umum, keikutsertaan seseorang dalam aktivitas politik praktis tidak terlepas dari adanya dorongan untuk mengerjakan aktivitas yang diyakini dilakukan

⁵ Sulistyowati, T. Dilema Gender Kebijakan Politik Untuk Perempuan. *Sosial Politik*.

⁶ *Ibid.*,

secara sukarela dan berdasarkan keputusan sendiri, selain itu keputusan aktivitas dalam politik praktis tersebut juga secara langsung mendapatkan kepuasannya. Selain itu, seseorang yang terjun dalam dunia politik secara sukarelawan secara langsung menguntungkan dirinya sendiri hal ini disebabkan keaktifan dirinya untuk memperoleh pengakuan dan kepuasan bagi dirinya.⁷ Pilihan politik seseorang dalam aktivitas politik praktis tentu tidak terlepas dari motivasi yang terdapat dalam dirinya.

Adapun motivasi politik berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian: a) Dorongan yang timbul pada diri seseorang sadar atau tidak sadar untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu; b) Usaha-usaha yang dapat menyebabkan seseorang atau kelompok tertentu tergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya.⁸

Berdasarkan hal tersebut motivasi politik dapat juga menjelaskan secara spesifik keinginan perempuan dalam panggung politik dalam hal ini keikutsertaan perempuan mencalonkan diri sebagai kepala desa, aktivitas ini melahirkan motif-motif tertentu yang menjadi landasan dorongan guna memasuki dunia politik, oleh karenanya motif itu berdasarkan dan dorongan, keinginan, hasrat dan tenaga penggerak lainnya yang berasal dari dalam dirinya.⁹

Motif-motif inilah yang membentuk aktivitas dominan terhadap kegiatannya dalam politik.¹⁰ Meskipun demikian keinginan perempuan perlu mendapat dukungan dari komunitasnya, sehingga semakin menguatkan keinginannya untuk maju berkompetisi; *“But motivation isn’t their job. It’s a manager’s job. After all, line management wants the credit for result-and quite rightly”*.¹¹ Selanjutnya, yang melatarbelakangi timbulnya motif seseorang adalah karena adanya keinginan untuk memenuhi kebutuhan, sebagaimana yang dinyatakan oleh Walter Langer bahwa kebutuhan manusia itu ada tiga macam, yaitu:

- a. Kebutuhan fisik (*physical needs*), yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan kenyamanan tubuh, seperti makan, minum dan pakaian.
- b. Kebutuhan sosial (*social needs*), yaitu kebutuhan untuk berhubungan dengan orang lain secara akrab.
- c. Kebutuhan egoistis (*egoistic needs*), yaitu kebutuhan yang tujuannya bukan semata-mata untuk berhubungan dengan orang lain, akan tetapi lebih dari itu ingin mendapat pengakuan keistimewaan dari orang lain akan dirinya.¹² Dengan ketiga macam kebutuhan tersebut, tentunya masing-masing orang memiliki keinginan untuk dapat memenuhinya, dan dorongan keinginan untuk dapat

⁷ Arnold Steinberg, 1984. Kampanye Politik Dalam Praktek, Jakarta, PT. Intermedia.

⁸ KBBI, 2016. Kamus Besar Available [Diakses 21 Agustus 2021]. at: Bahasa Indonesia (KBBI).

⁹ W.A. Gerungan, Psikologi social, PT. Eresco, Bandung, 1983.

¹⁰ Hugo F Reading, 1986. Kamus Ilmu-ilmu Sosial, terjemahan.

¹¹ Sargent, A. (2001). RCHME 1908-1998 A History of the Royal Commission on the Historical Monuments of England. *Transactions-Ancient Monuments Society*, 57-80.

¹² Effendy, O. U. (1983). Human Relations and Public Relations.

memenuhi kebutuhan menyebabkan seseorang termotivasi; baik itu motivasi berprestasi, motivasi berafiliasi maupun motivasi berkuasa.¹³

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian empiris dan jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Dimana teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara berpedoman pada pedoman wawancara yang bersifat terstruktur dan terbuka. Selanjutnya pemilihan informan penelitian ditetapkan pada kepala desa perempuan di beberapa desa Jawa Tengah.¹⁴

Informan penelitian ini terdiri dari 5 orang kepala desa yang berasal dari 3 kabupaten di Provinsi Jawa Timur, yakni:

1. Desa Wonosari, Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan
2. Desa Wрати, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan
3. Desa Gading, Krembung, Kabupaten Sidoarjo
4. Desa Ketan Ireng, Kecamatan Prigen, Kabupaten Malang
5. Desa Wilujeng, Kecamatan Prigen, Kabupaten Malang.

Dengan demikian data yang diperoleh dari informan penelitian akan didukung melalui studi literatur yang relevan dengan topik kajian ini. Selain itu riset ini dianalisis secara non-statistik, dan hasil yang akan diperoleh bersifat deskriptif kualitatif sesuai dengan metode analisisnya yang deskriptif analitis.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Motivasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Kepala Desa

Motivasi politik perempuan dalam pemilihan kepala desa dapat dimaknai sebagai suatu keinginan dan dorongan dari seseorang untuk melakukan suatu keputusan atau tindakan politiknya, dalam konteks ini motivasi politik perempuan menjadi kepala desa. Motivasi politik dalam penelitian ini berangkat dari konsep dan indikator bentuk motivasi dari seseorang dapat dilihat sebagai berikut ini

- 1) Adanya keinginan dan dorongan dari diri dan didukung sebagian kecil dorongan dari luar dirinya baik internal maupun pengaruh eksternal,
- 2) Untuk melakukan tindakan tertentu yang terkait dengan pelaksanaan pemilihan langsung,
- 3) Dalam mencapai suatu tujuan politik tertentu yakni dalam meraih jabatan kepala desa,
- 4) Adanya aktivitas politik yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu.

¹³ Indrajaya, A. I. (2002). Perilaku Organisasi. *Bandung: Sinar Baru Algensindo*.

¹⁴ Sugiyono, (2008). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Alfabeta, Bandung.

Pemilihan kepala desa yang dilakukan secara langsung dituntut dilakukan secara terbuka dan menciptakan kompetensi antar calon dan pemilih sebagai pemilih sosok pemimpinnya. Seorang kandidat akan berkompetisi dengan kandidat lainnya untuk memperebutkan posisi kepala desa. Pemilihan secara langsung terkadang sangat kompetitif dan membutuhkan energi dan sumber daya yang tidak sedikit untuk dapat menjadi kepala desa. Pada setiap pemilihan, kandidat perempuan yang mencalonkan diri cenderung dalam posisi marginal dan tidak diunggulkan untuk memenangkan posisi kepala desa, lawan-lawan politik mereka selalu didominasi oleh kandidat laki-laki. Dari beberapa informan penelitian ini, hanya terdapat satu desa yang pada saat pemilihan terdapat dua orang kandidat kepala desa perempuan, selebihnya didominasi oleh kandidat laki-laki. David Mc. Clelland dalam teori mengenai motivasinya disebut dengan istilah *need for an achievement* yang memiliki makna tiga motif seseorang dalam melakukan suatu keputusan dan tindakannya di antaranya adalah; 1) motivasi diri untuk dapat berprestasi; 2) Motivasi diri untuk dapat memiliki afiliasi dengan kelompok atau individu lainnya; 3) Motivasi diri untuk berkuasa atau mendapatkan kekuasaan dan kewenangan.

Ketertarikan perempuan menjadi kepala desa dapat dilihat dari aspek dorongan dan motivasi keinginannya untuk mengambil keputusan. Pertama, motivasi tindakan dan keputusan tersebut tidak terlepas dari masalah harga diri seseorang atau individu bahkan harga diri keluarga, bahkan secara lebih luas motivasi ini juga dapat dilihat dari dorongan ingin berkuasa. Kedua, terdapat motivasi seorang perempuan untuk menghasilkan uang yang pada akhirnya dapat dipergunakan dan dimanfaatkan pengaruh orang lain atau bahkan kelompok lain di luar kelompok internalnya secara lebih luas. Ketiga, motivasi lain bagi perempuan menjadi kepala desa juga dapat dilihat dari keinginan dan dorongan ingin berprestasi dalam menjadi pemimpin kepala desa di wilayahnya. Dengan demikian ketika terpilih sebagai kepala desa ia akan bertindak dan berbuat sesuatu demi desanya, hal ini dapat dilihat sebagai pengabdian kepada rakyat dan dengan tujuan mensejahterakan warga secara nyata.

Fenomena lainnya yang menarik adalah alasan perempuan yang menjadi kepala desa cenderung karena dorongan dari keluarga dan kelompok sekitarnya. Banyak kandidat perempuan yang muncul karena adanya sejarah kepemimpinan desa dalam keluarganya, baik itu orang tua atau suami yang dulunya kepala desa dan mendorong perempuan tersebut menjadi kepala desa.¹⁵ Satu contoh di antaranya adalah, kepala desa perempuan disambut baik oleh warganya. Hal ini disebabkan kepala desa selain sebagai pemimpin juga sebagai sosok perempuan dinilai oleh masyarakat mampu membimbing, serta memotivasi masyarakatnya untuk berpartisipasi dalam berbagai agenda dan kegiatan pemerintah desa baik dalam konteks pembangunan desa maupun dalam konteks menjalankan program atau kebijakan pemerintah yang lebih tinggi di atasnya. Dalam pelaksanaan perannya kepala desa perempuan memiliki keunggulan dalam kecakapan komunikasi antar masyarakat dan kelompok sehingga mampu melahirkan suatu hubungan yang baik antara pemerintah desa dengan lintas sektor dan

¹⁵ Sari, Y. P. (2022). Peran kepemimpinan kepala desa perempuan dalam pembangunan desa di Desa Banjarsari Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang. *UM*.

elemen masyarakat dan tentunya dapat mempengaruhi kebijakan terkait dengan pembangunan.

Salah seorang informan meneruskan *legacy* suaminya yang sebelumnya menjabat sebagai kepala desa selama dua periode di desa tersebut. Informan lainnya juga mendapatkan “warisan” dari orang tuanya yang pada beberapa tahun sebelumnya menjabat sebagai kepala desa hampir tiga periode. Dorongan dari kelompok sekitar juga didapat dari salah seorang informan, perempuan yang pada awalnya seorang aktivis di lingkungan desanya didorong untuk menjadi kandidat kepala desa karena ketidakpuasan masyarakat dan komunitas terhadap kepemimpinan kepala desa sebelumnya. Kandidat ini kemudian mendapatkan motivasi dan dorongan untuk memenangkan pemilihan karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kepemimpinan kepala desa sebelumnya.

Perempuan yang memiliki sejarah keluarga dalam kepemimpinan desa pada awalnya tidak terlalu antusias untuk ikut dan memenangkan pemilihan. Hal ini terbukti dengan adanya informan yang dengan tulus mengungkapkan kurang respect terhadap pencalonannya oleh karena berawal dari ketidaksiapannya untuk menjadi kepala desa dan bahkan dapat dikatakan sebagai “penggembira” saja. Temuan penelitian menunjukkan bahwa yang telah cukup memahami tugas yang harus diembannya sebagai kepala desa dorongan dan keinginan dirinya untuk menjadi kepala desa adalah demi mengaktualisasikan dirinya berdasarkan apa yang telah diperolehnya selama ini, serta dalam rangka menyalurkan impiannya tentang kehidupan berpolitik di era demokrasi sekarang. Dorongan dan motivasi perempuan menjadi kepala desa dapat dikategorikan sebagai dorongan yang muncul dari dalam diri sendiri sebagai dorongan yang kuat dengan segala eksistensinya yang melekat didalamnya, serta dorongan yang muncul dari dalam diri sendiri.

Terhadap pertanyaan seputar dorongan untuk menjadi kepala desa ternyata jawaban para informan sangat variatif sekali. Jawaban yang mengemuka antara lain dapat disebutkan:

- a) Dorongan oleh keluarga untuk menjadi kepala desa karena dulunya orang tua atau suami adalah kepala desa,
- b) Dorongan oleh lingkungan sekitar yang melihat bahwa kandidat perempuan tersebut sangat potensial untuk menjadi kepala desa dan dapat memperbaiki dan membangun desa mereka,
- c) Dorongan dari diri sendiri, keinginan untuk mengaktualisasikan diri dan terlibat dalam aktivitas politik di desa.

2. Tujuan yang ingin dicapai menjadi kepala desa

Menjadi kepala desa bagi seorang perempuan menjadi daya tarik sendiri dalam melihat secara mendalam motivasi dan tujuannya dalam mengambil keputusan tersebut. Berdasarkan hal tersebut tujuan yang ingin dicapai untuk menjadi kepala desa sebagian besar perempuan adalah untuk membangun dan menumbuhkan

perekonomian dan kehidupan di desa nya menjadi lebih baik, selain itu ada beberapa kepala desa perempuan yang menganggap adanya panggilan hati nurani untuk memperjuangkan aspirasi rakyat.

Tujuan kandidat secara umum cenderung normatif, akan tetapi jika dikorelasikan dengan dorongan mereka untuk menjadi kepala desa yang sebagian besar karena permintaan keluarga atau lingkungan sekitar, maka pada dasarnya motif kekuasaan lebih mencuat. Salah satu kepala desa perempuan bahkan hanya menjadi “boneka” dan si suami yang menjadi “kepala desa” dan mengontrol pemerintahan desa tersebut. Fenomena ini menjadi menarik untuk diteliti lebih lanjut bagaimana dampaknya terhadap kondisi pemerintahan di desa tersebut.

3. Tingkatan Kebutuhan Perempuan Menjadi Kepala Desa

Motivasi perempuan dalam konteks pemilihan kepala desa dapat dilihat dari teori kebutuhan manusia yang dituliskan oleh Abraham Maslow. Dalam teorinya, setiap manusia terdapat lima kebutuhan mendasar manusia yaitu: a) tingkatan pertama adalah fisik atau biologis; b) Tingkatan kedua adalah adanya rasa aman; c) Tingkatan ketiga adalah rasa diikutsertakan, rasa cinta dan aktivitas; d) Tingkatan keempat adalah mendapatkan rasa hormat; e) Tingkatan kelima adalah aktualisasi atau realisasi diri di tengah komunitas atau kelompok sosialnya.¹⁶

Berdasarkan unsur dan pola tingkatan kebutuhan manusia dalam hal ini adalah perempuan dalam penelitian ini dikaitkan dengan kehadiran perempuan dalam kepemimpinan menjadi kepala desa. Dalam riset ini menunjukkan bahwa perempuan baru berada pada tingkatan ketiga yaitu rasa disertakan, rasa cinta dan aktivitas sosial. Terdapat sebagian kecil temuan lain yang menunjukkan bahwa posisi perempuan menjadi kepala desa disebabkan karena dibesarkan dalam lingkungan keluarga pemimpin desa dan punya hobi berorganisasi, maka tetap bisa eksis sampai sekarang serta semangat ini diwariskan secara turun temurun ke generasi berikutnya. Selain itu jika merujuk teori kebutuhan manusia dari Abraham Maslow adalah motivasi politik perempuan menjadi kepala desa adalah untuk diri sendiri yang kemudian mengimplementasikan dengan berkecimpung dalam desa dan itulah jawaban yang paling dominan.¹⁷

Perempuan yang menjadi kepala desa juga tidak dapat dipisahkan demi memenuhi 3 (tiga) tingkatan sekaligus yaitu rasa aman, rasa disertakan, rasa cinta dan aktivitas sosial serta rasa hormat terhadap dirinya dari kelompok sosial dan masyarakat di wilayah kepemimpinannya. Hal ini dikarenakan tingkat 2, 3, dan 4 tidak dapat dilihat secara parsial atau sendiri-sendiri tetapi secara simultan atau menyeluruh. Oleh sebab itu, tidak masuk akal jika hanya memilih salah satu diantaranya. Bahkan temuan penelitian melihat kehadirannya sebagai kepala desa untuk memenuhi rasa hormat sekaligus sebagai wujud aktualisasi diri, karena menurutnya tingkatan kebutuhan

¹⁶ A.H. Maslow, *Motivation and Personality*, New York: Harper and Brothers Publishers, 1954

¹⁷ *Ibid.*,

manusia 1, 2, dan 3, semua sudah terpenuhi dengan baik dan tidak punya halangan apapun.

Berangkat dari temuan di atas dapat dijadikan representasi politik perempuan di ruang publik, Kuzuki Iwaguna (2008) menjelaskan bahwa sebagai bentuk paradoks politik, yang disebabkan jumlah perempuan di kawasan Asia menjadi penyumbang suara terbanyak, namun dalam konteks realitas perempuan di ruang publik tidak sebanding dengan pemimpin yang diisi oleh kaum laki-laki.¹⁸ Akan tetapi pada saat yang sama perempuan hanya dapat menempati peranan dan posisi marginal serta tidak strategis dalam berbagai struktur pemerintah. Temuan ini paling tidak dapat membantah argumentasi Iwaguna dalam peranan perempuan di ruang publik, dimana perempuan menjadi pemimpin sebagai kepala desa di Jawa Timur dapat diterima oleh struktur sosial masyarakat sebagai suatu representasi politik bagi kepentingan masyarakatnya.

D. KESIMPULAN

Sebagai kesimpulan dalam penelitian ini dapat dilihat dari tiga temuan penting. Pertama, motivasi politik perempuan menjadi kepala desa adalah memperoleh kekuasaan, selain itu juga terdapat di antaranya yang memilih atas dasar keikutsertaan semata yang disebabkan karena tuntutan dari keluarga dan lingkungan sekitarnya. Kedua, kebutuhan untuk meneruskan *legacy* dan tradisi keluarga sangat menonjol untuk mendorong kandidat perempuan menduduki jabatan kepala desa perempuan. Walaupun demikian, terdapat beberapa kandidat perempuan yang memang memiliki keinginan dan motivasi untuk memperbaiki kondisi desanya dan menjadi dasar utama mereka untuk memimpin desa. Ketiga, tingkat kebutuhan kepala desa perempuan cukup variatif, namun secara umum kebutuhan untuk ingin disertakan dan karena aktivitas sosial menjadi dasar utama mereka untuk menjadi pemimpin di tingkat lokal.

REFERENSI:

- A.H. Maslow, *Motivation and Personality*, New York: Harper and Brothers Publishers, 1954
- Arnold Steinberg, 1984. *Kampanye Politik Dalam Praktek*, Jakarta, PT. Intermedia.
- Effendy, O. U. (1983). *Human Relations and Public Relations*.
- Hugo F Reading, 1986. *Kamus Ilmu-ilmu Sosial*, terjemahan.
- Indrajaya, A. I. (2002). *Perilaku Organisasi*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- KBBI, 2016. *Kamus Besar Available* [Diakses 21 Agustus 2021]. at: Bahasa Indonesia (KBBI).
- McClelland, D. C. (1987). *Human motivation*. Cup Archive.

¹⁸ Iwanaga, Kazuki (Prynt) *Women's Political participation and representation in Asia*.

- Sargent, A. (2001). RCHME 1908-1998 A History of the Royal Commission on the Historical Monuments of England. *Transactions-Ancient Monuments Society*, 57-80.
- Sari, Y. P. (2022). Peran kepemimpinan kepala desa perempuan dalam pembangunan desa di Desa Banjarsari Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang. *UM*.
- Sugiyono, (2008). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Alfabeta, Bandung
- Sulistyowati, T. Dilema Gender Kebijakan Politik Untuk Perempuan. *Sosial Politik*.
- Undang - Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- Undang – Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
- W.A. Gerungan, Psikologi Social, PT. Eresco, Bandung, 1983.